

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT,  
DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)**

<sup>1st</sup> Iriyanti Saputri, <sup>2nd</sup> Dr. Sharifuddin Husen, Ak., M.Si., M.Ak  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta  
Jl. Dr. KRT Radjiman Widyodigrat  
Kp. Pedurenan RT.02/RW.06 No. 40  
Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung,  
Jakarta Timur, 13920  
iriyantisaputri@gmail.com, sharifuddin\_husen@stei.ac.id

**Abstract** - This study aims to examine whether the influence of the Independent Commissioner, Audit Committee, and Institutional Ownership Structure on Tax Avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI).

This study uses a quantitative approach, which is measured using multiple linear regression-based methods with SPSS Version 22. The population of this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) Index 45 from 2014 to 2017. The sample was determined using the purposive sampling method, with a total sample of 9 manufacturing companies so that the total observations in this study were 36 observations. The data used in this study are secondary data. The data collection technique uses the documentation method through the official website of each company and through the official IDX website: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Hypothesis testing using the t test.

The results showed that (1) the Audit Committee has a significant effect on Tax Avoidance, (2) the Independent Commissioner has no significant effect on Tax Avoidance, (3) Institutional Ownership has no significant effect on Tax Avoidance.

**Keywords:** Independent Board of Commissioners, Audit Committee, Institutional Ownership, Tax Avoidance (CETR)

**Abstrak**– Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh dari Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Struktur Kepemilikan Institusional, terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang diukur menggunakan metode berbasis regresi linier berganda dengan SPSS Versi 22. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Indeks 45 tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 9 perusahaan manufaktur sehingga total observasi dalam penelitian ini sebanyak 36 observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi

melalui situs web resmi masing-masing perusahaan dan melalui situs resmi IDX: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Pengujian hipotesis menggunakan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, (2) Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, (3) Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

**Kata kunci : Dewan komisaris independen, Komite audit, Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak (CETR).**

## I. PENDAHULUAN

Pajak sebagai wujud kepatuhan warga negara terhadap negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk kesejahteraan suatu negara. Oleh karena itu, menurut (Hanafi, 2014) negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Pajak menjadikan beban bagi perusahaan, karena perusahaan merupakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam cara, seperti upaya efisiensi beban termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari ketentuan perpajakan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah untuk meminimalkan beban pajak. Penafsiran ketentuan pajak yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang dibuat, serta melanggar ketentuan perpajakan yang tidak secara jelas juga dapat meminimalkan beban pajak. Upaya penggelapan pajak merupakan bagian dari kegiatan penghindaran pajak yang menjadi perhatian fiskus untuk saat ini. Dengan kegiatan tersebut negara akan mengalami kehilangan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam jumlah yang signifikan. Penghindaran pajak dapat berdampak pada kerugian negara serta tidak terpenuhinya kesejahteraan warga negara

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Dengan adanya Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus kepada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan terhadap fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif dalam memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham perusahaan.

### 1.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen dalam corporate governance terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh komite audit dalam corporate governance terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dalam corporate governance terhadap penghindaran pajak?

### 1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan menguji pengaruh komisaris independen dalam *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh komite audit dalam *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan institusional dalam *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

## II. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan teori agensi, manajer dan eksekutif lainnya dalam perusahaan sebagai agen yang diharapkan oleh pemegang saham agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Bagian dari manajer perusahaan yaitu komite audit yang berpengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Permasalahan agensi yang belum terselesaikan akan dapat menyebabkan manajer untuk terlibat dalam lebih atau kurang penghindaran pajak perusahaan dari pada pemegang saham sebaliknya (Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker, 2015). Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik *principal* ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymetry information*) di antara *principal* dengan *agent* (Midiastuty & Suranta, 2017).

### 2.2. *Corporate Governance*

*Corporate Governance* (CG) merupakan tata kelola pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan (Wijayanti, Wijaya, & Chomsatu, 2017). Prinsip *Corporate Governance* dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama pada prinsip transparansi. *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan agar kinerja perusahaan dijalankan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan bersama dan menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan serta dapat menghasilkan laporan keuangan yang *akuntabel* bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan yang didalamnya terdapat struktur yang mengatur pola hubungan antara para pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.

### 2.3. Mekanisme *Corporate Governance*

Penerapan mekanisme *corporate governance* dalam sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Selain itu, dengan adanya mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan pada suatu periode, yang menggambarkan kesejahteraan para pemegang saham. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan elemen-elemen yang terkandung dalam mekanisme *corporate governance* yaitu mencakup dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional

### 2.4. Pajak

Pengertian pajak secara umum adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan aturan undang-undang. Ada beberapa unsur-unsur pajak seperti obyek pajak, subyek pajak dan tarif pajak yang dikenakan. Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2014).

## **2.5. Pengembangan Hipotesis**

### **2.5.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak**

Komisaris independen sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Oleh karena itu, semakin tinggi presentase dewan komisaris independen, maka semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen. Sehingga, independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan penghindaran pajak dapat semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah presentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan penghindaran pajak semakin tinggi.

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajiban dan kesetaraan antara kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya. Agar dewan komisaris dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, harus memenuhi beberapa prinsip yaitu terkait komposisi dewan komisaris yang harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Selain itu, dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Ningsih & Mildawati, 2017).

Komisaris independen mempunyai peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang bertindak sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengawasan perusahaan oleh pemilik, sehingga dewan komisaris independen berkepentingan untuk memastikan bahwa manajemen melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan yang diberikan oleh para pemegang saham. Dengan adanya fungsi pengawasan dari dewan yang independen, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan eksekutif yang lain melakukan manipulasi laba. Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H1 : Dewan Komisaris Independen dalam Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.**

### **2.5.2. Pengaruh Komite Audit dalam Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak**

Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen, karena komite audit sangat penting bagi perusahaan. Sehingga, komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, anggotanya diangkat, dan diberhentikan oleh dewan komisaris, bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Dengan adanya komite audit dalam sebuah perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada

akhirnya ditunjukkan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Komite Audit berperan membantu dewan komisaris dalam mengawasi beberapa hal, yaitu laporan keuangan, struktur pengendalian internal perusahaan, serta audit internal dan eksternal. Dalam peraturan tersebut dibahas pula mengenai ketentuan ketua komite audit yaitu merupakan komisaris independen, sedangkan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Selain itu, salah satu anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan (Puspitaningrum & Syafiqurrahman, 2015).

Komite audit juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga berhubungan dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan ketaatan terhadap peraturan. Oleh karena itu, komite audit dapat mengurangi pengukuran, kesalahan, dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan dengan manajemen laba oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum. Sehingga, semakin banyak jumlah komite audit, maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit, maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H2 : Komite Audit dalam Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.5.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Corporate Governance terhadap Penghindaran pajak**

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Dengan adanya Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional sebagai pemegang saham ikut aktif dalam mengawasi keefektifan dan keefisienan dalam pengelolaan perusahaan termasuk pengelolaan pajak perusahaan terkait tingkat pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan (Mahenthiran dan Kasipilai, 2012).

Dalam agency theory telah dijelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal menimbulkan konflik antara pihak- pihak tersebut. Oleh karena itu perlu adanya monitor dari pihak luar yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah pemilih saham institusional. Pemilik saham institusional adalah pemilik saham dari institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, dan institusi lain. Dengan adanya pemilik saham institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer, dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Dengan demikian diajukan hipotesis sebagai berikut:

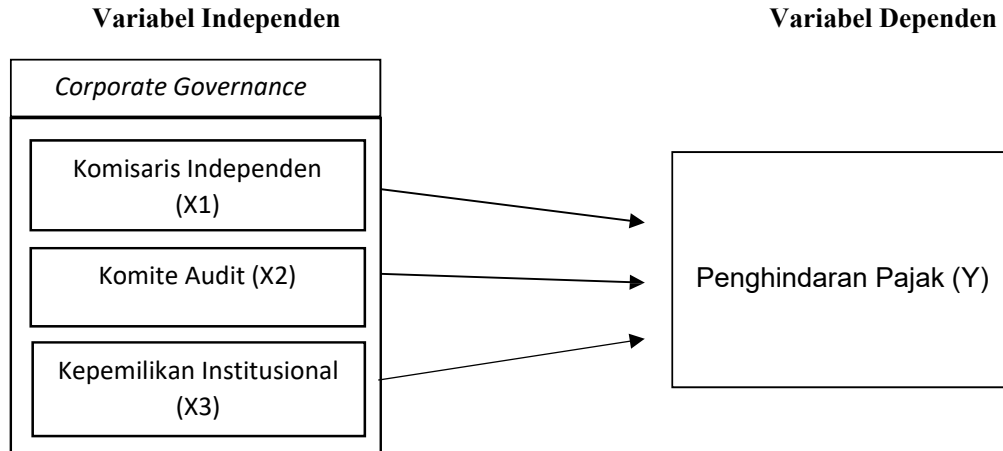
**H3 : Kepemilikan Institusional dalam Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak**

## **2.5 Kerangka Konseptual Penelitian**

---

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dijelaskan atau digambarkan dengan hubungan variabel yaitu corporate governance dengan proksi ukuran komite audit dan proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Variabel dependen pada penelitian ini adalah agresivitas pajak. Berikut adalah kerangka penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**



Sumber : Penulis 2020

### III. METODA PENELITIAN

#### 3.1. Strategi Penelitian

Strategi penelitian ini berbentuk penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris, ukuran komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan hubungan kausal adalah hubungan yang berifat sebab akibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada populasi tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2016).

#### 3.2. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang sudah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kelompok perusahaan manufaktur dipilih sebagai populasi karena sebagian besar perusahaan di BEI termasuk dalam jenis ini sehingga diharapkan hasil penelitian dapat digeneralisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Indeks 45 selama periode 2014-2017 yang berjumlah 45 emiten. Alasan memilih perusahaan manufaktur indeks 45 adalah ingin melihat apakah dalam perusahaan 45 teratas di dalam BEI terdapat kecenderungan melakukan penghindaran pajak.

Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Seringkali banyak batasan yang menghalangi peneliti mengambil sampel secara *random* (acak). Sehingga



kalau menggunakan *random sampling* (sampel acak), akan menyulitkan penelitian. Dengan menggunakan *purposive sampling*, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan keuangan selama Periode tahun 2014-2017.
2. Perusahaan tidak mengalami delisting dari BEI selama periode 2014-2017.
3. Perusahaan menyajikan informasi mengenai dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan informasi perpajakan dalam laporan tahunannya.
4. Perusahaan yang memperoleh laba sepanjang tahun penelitian.

### **3.3. Metode Analisis Data**

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda dengan teknik pengolahan data yang menggunakan teknik analisa kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik. Analisis statistik adalah menganalisa dengan berbagai dasar statistik dengan cara membaca tabel, grafik atau angka yang telah tersedia kemudian dilakukan beberapa uraian atau penafsiran dari data-data tersebut. Penelitian ini menggunakan program software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 22.

SPSS merupakan program aplikasi bisnis yang digunakan untuk menganalisa data statistik. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada kemudahan penggunaannya dalam mengolah dan menganalisa data statistik. Program SPSS yang digunakan yaitu Program SPSS 22. Adapun analisis yang dilakukan sebagai berikut: Data yang digunakan dalam analisis statistik yaitu dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional sebagai variabel bebas dan penghindaran pajak sebagai variabel terikat.

#### **3.3.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2016).

#### **3.3.2. Uji Asumsi Klasik**

Uji regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model penelitian telah memenuhi syarat, yakni lolos dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada/tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

##### **3.3.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013) :

1. Jika data menyebar diatas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### 3.3.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Hanafi, 2014). Untuk mengetahui ada/tidaknya multikolonieritas adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance.

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variable independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai tolerance dan VIF adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai tolerance  $\geq 0,10$  atau nilai VIF  $\leq 10$ , maka berarti tidak terjadi multikolonieritas.
2. Jika nilai tolerance  $\leq 0,10$  atau nilai VIF  $\geq 10$ , maka berarti terjadi multikolonieritas.

### 3.3.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji durbin-watson. Mekanisme pengujian durbin-watson dalam (Hanafi, 2014) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis Ho: tidak ada autokorelasi Ha: ada autokorelasi
2. Menentukan nilai d hitung
3. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel independen, Tentukan nilai batas independen ( $d_u$ ) dan batas bawah ( $d_l$ ) dari tabel.
4. Mengambil keputusan dengan kriteria, jika:
  - a.  $0 < d < d_l$ , Ho ditolak, berarti tidak ada autokorelasi positif.
  - b.  $d_l < d < d_u$ , daerah tanpa keputusan (grey area), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan (inconclusive).
  - c.  $d_u < d < 4-d_u$ , Ho diterima, tidak ada autokorelasi.
  - d.  $4 - d_u < d < 4-d$ , daerah tanpa keputusan (greyarea), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan (inconclusive).
  - e.  $4 - d_l < d$

### 3.3.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan varianc residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan studentized delete residual nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan studentized delete residual sehingga dapat dikatakan model tersebut homoskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Ghozali, 2013).



Gambar scatter plot menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik di atas sebaiknya tidak berpola.

### 3.3.3. Analisis Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) menurut (Ghozali, 2013). Penelitian ini menguji pengaruh corporate governance (komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional) terhadap penghindaran pajak perusahaan (cash effective tax rate). Persamaan regresi penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Penghindaran Pajak

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

$X_1$  : Dewan komisaris independen

$X_2$  : Komite audit

$X_3$  : Kepemilikan institusional

e : Faktor eror

### 3.3.4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), dimana semakin besar nilai  $R^2$  suatu regresi atau nilainya mendekati 1, maka hasil regresi tersebut semakin baik.

### 3.3.5. Pengujian Hipotesis

#### 3.3.5.1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-tabel dengan t-hitung. Jika t-tabel < t-hitung maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dan apabila nilai probabilitas signifikansi p-value < 0,05, maka suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ghozali, 2006).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak dalam bidang manufaktur pada tahun 2014-2017. Kelompok perusahaan manufaktur dipilih karena sebagian besar perusahaan di BEI termasuk dalam jenis ini sehingga diharapkan hasil penelitian dapat digeneralisasi. Pemilihan BEI sebagai populasi dalam penelitian ini dengan alasan BEI merupakan bursa efek terbesar dan representatif di Indonesia.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Perusahaan**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KODE SAHAM
1	PT. AKR Corporindo Tbk	AKRA
2	PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk	TPIA
3	PT. Adhi Karya Tbk	ADHI
4	PT. Astra International Tbk	AUTO
5	PT. Harum Energy Tbk	HRUM
6	PT. Waskita Karya T	WSKT
7	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
8	PT. Kalbe Farma Tbk	KLBF
9	PT. Mayora Indah Tbk	MYOR

Sumber: Penulis, 2020

Perusahaan-perusahaan dipilih dari populasi yang ada sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu perusahaan menyajikan informasi mengenai dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan informasi pajak dalam laporan tahunannya, serta perusahaan yang memperoleh laba sepanjang tahun penelitian. Berikut adalah profile dari perusahaan tersebut:

AKR Corporindo dengan kode saham AKRA, didirikan di Surabaya pada tanggal 28 November 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya. Bermula dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kimia dasar, bisnis Perseroan terus berkembang secara berkesinambungan. Hingga kini makin melebarkan sayapnya bergerak dibidang perdagangan dan distribusi, jasa logistik, pabrik, pertambangan dan perdagangan batubara, serta kawasan industri.

1. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Perseroan) adalah perusahaan petrokimiaterbesar dan terintegrasi di Indonesia serta satu-satunya yang mengoperasikan Naphtha Cracker. Komplek petrokimia Perseroan di Ciwandan, Cilegon, provinsi Banten adalah pabrik petrokimia utama yang memanfaatkan teknologi dan fasilitas pendukung canggih berkelas dunia yang memproduksi Olefins (Ethylene, Propylene dan produk turunan seperti Py-Gas dan Mixed C4). Selain itu, Perseroan juga memproduksi Polyolefins (Polyethylene dan Polypropylene), dan Styrene Monomer dan Butadiene beserta produk-produk turunannya yang dijual ke pasar domestik dan pasar regional. Pada awal berdirinya pada tanggal 2 November 1984 perusahaan ini diberi nama PT. Tri Polyta Indonesia dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993.
2. PT. Adhi Karya dengan kode saham ADHI merupakan perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia atau bahkan Asia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 11 Maret 1960. Saat ini PT. Adhi Karya memiliki ruang lingkup bidang usaha yang mencakup kontraktor sipil dan gedung, EPC (Engineering Procurement Construction), dan juga bisnis properti.
3. PT. Astra Internasional dengan kode saham AUTO, didirikan pada tanggal 20 Februari 1950. Perusahaan ini bergerak pada bidang usaha perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi. PT. Harum Energy Tbk dengan kode saham HRUM adalah perusahaan energi terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal

12 Oktober 1995, dengan portofolio usaha di bidang pertambangan batu bara dan kegiatan logistic yang berlokasi di Kalimantan Timur, Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya didirikan dengan nama PT Asia Antrasit dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 200.

4. PT. Waskita Karya Tbk dengan kode saham WSKT didirikan dengan nama Perusahaan Negara Waskita Karya pada tanggal 01 Januari 1961 dari perusahaan asing bernama “Volker Aanemings Maatschappij NV” yang dinasionalisasi oleh Pemerintah. Perusahaan ini bergerak dibidang industri konstruksi, pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan.
5. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF didirikan tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Perusahaan ini bergerak dalam industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum, dan tekstil pembuatan karung terigu
6. PT. Kalbe Farma Tbk dengan kode saham KLBF didirikan pada tanggal 10 September 1966 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1966. Perusahaan bergerak dibidang farmasi, perdagangan, dan perwakilan. Terutama bergerak dalam bidang pengembangan, pembuatan dan perdagangan sediaan farmasi, produk obat-obatan, nutrisi, suplemen, makanan dan minuman kesehatan hingga alat-alat kesehatan termasuk pelayanan kesehatan primer.
7. PT. Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYOR didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Perusahaan bergerak dibidang industri, perdagangan, serta agen perwakilan. Saat ini, Mayora menjalankan bidang usaha industri biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan kesehatan, serta menjual produknya di pasar local dan luar negeri.

#### **4.2. Hasil Uji Analisis Data Penelitian**

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen corporate governance (dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit) terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

##### **4.2.1. Statistik Deskriptif**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen (Y) yaitu agresivitas pajak serta variabel independen yaitu corporate governance (dewan komisaris independen ( $X_1$ ), komite audit ( $X_2$ ) dan kepemilikan institusional ( $X_3$ )). Jumlah data yang didapat sebanyak 36. Hasil pengujian variabel-variabel tersebut secara deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.2 uji statistika deskriptif.

**Tabel 4.3**  
**Uji Statistika Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen (X1)	36	,29	,67	,3674	,06792
Komite Audit (X2)	36	3,00	4,00	3,2222	,42164
Kepemilikan Institusional (X3)	36	,01	,96	,6373	,21595
Penghindaran Pajak (Y)	36	,02	,65	,2524	,13486
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data yang diolah SPSS versi 22

Variabel dewan komisaris independen dalam Corporate Governance diukur dengan menggunakan jumlah komisaris independen dari total dewan komisaris pada satu perusahaan. Komisaris independen juga merupakan anggota dewan komisaris, tapi mereka mempunyai kekhususan dengan tidak boleh terkait atau berhubungan manajemen, anggota dewan komisaris yang lain serta pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan kaitannya yang mungkin bisa merusak keindependennya. Berdasarkan tabel 4.2, hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap variabel dewan komisaris independen dalam Corporate Governance menunjukkan nilai minimum dari dewan komisari independen adalah 0,29. Nilai maksimum dari dewan komisaris independen adalah 0,67. Nilai rerata dari dewan komisaris independen adalah 0,367. Berdasarkan ketentuan pencatatan Bursa Efek Indonesia mensyaratkan bahwa anggota dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dari data sampel pada penelitian ini minimum perusahaan memiliki jumlah anggota dewan komisaris independen dibawah 30% atau yang disyaratkan oleh BEI, artinya rata-rata perusahaan sudah menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh BEI, sehingga terindikasi dapat meminimalisir penghindaran pajak.

Variabel ukuran komite audit dalam Corporate Governance ditentukan dengan berapa banyaknya jumlah anggota komite audit dalam satu perusahaan manufaktur. Komite audit adalah komite yang memang dibuat pihak Dewan Komisaris untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan. Komite audit juga harus bersifat independen dan tentunya mempunyai tanggungjawab kepada dewan komisaris untuk mengontrol dan mengawasi proses, aktivitas dan kinerja laporan keuangan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal serta membantu auditor menguatkan independensinya. Berdasarkan tabel 4.2, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel komite audit dalam Corporate Governance menunjukkan nilai minimum dari komite audit adalah 3 anggota. Nilai maksimum dari komite audit adalah 4 anggota. Nilai rerata dari komite audit adalah 3 anggota. Dari data sampel pada penelitian ini minimum perusahaan memiliki jumlah komite audit dibawah tiga 3 anggota, maka rata-rata perusahaan sudah menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam, sehingga terindikasi dapat meminimalisir penghindaran pajak.

Variabel kepemilikan institusional dalam Corporate Governance diukur dengan menggunakan jumlah saham institusional dari jumlah saham beredar pada satu perusahaan. Jumlah kepemilikan institusional akan mempengaruhi manajer untuk berfokus pada kinerja dan menghindari peluang untuk melakukan perilaku oportunistik yang

mementingkan kepentingan pribadi. Berdasarkan tabel 4.2, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel kepemilikan institusional dalam Corporate Governance menunjukkan nilai minimum dari kepemilikan institusional adalah 0,01. Nilai maksimum dari kepemilikan institusional adalah 0,96. Nilai rerata dari kepemilikan institusional adalah 0,637. Dari data sampel pada penelitian ini minimum perusahaan memiliki jumlah kepemilikan institusional 0,01, maka rata-rata perusahaan sudah menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh BEI, sehingga terindikasi dapat meminimalisir penghindaran pajak.

Variabel penghindaran pajak diukur dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), semakin mendekati nol nilai yang dihasilkan maka semakin agresif suatu perusahaan terhadap pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Berdasarkan tabel 4.2, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel manajemen laba menunjukkan nilai minimum dari penghindaran pajak adalah 0,02. Nilai maksimum dari penghindaran pajak adalah 0,65. Nilai rerata dari penghindaran pajaki adalah 0,252. Data sampel pada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki nilai CETR yang mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan sampel terindikasi melakukan penghindaran pajak.

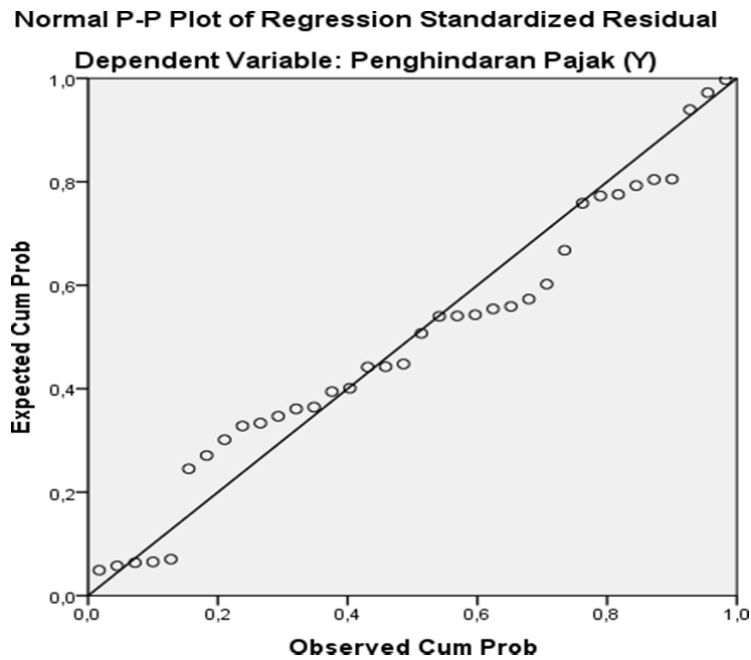
#### **4.2.2. Uji Asumsi Klasik**

##### **4.2.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan alat uji grafik histogram dan grafik normal p-plot. Dasar pengambilan keputusan pada uji grafik histogram dan grafik normal p-plot adalah dengan melihat bentuk grafik dan persebaran titik-titik residual.

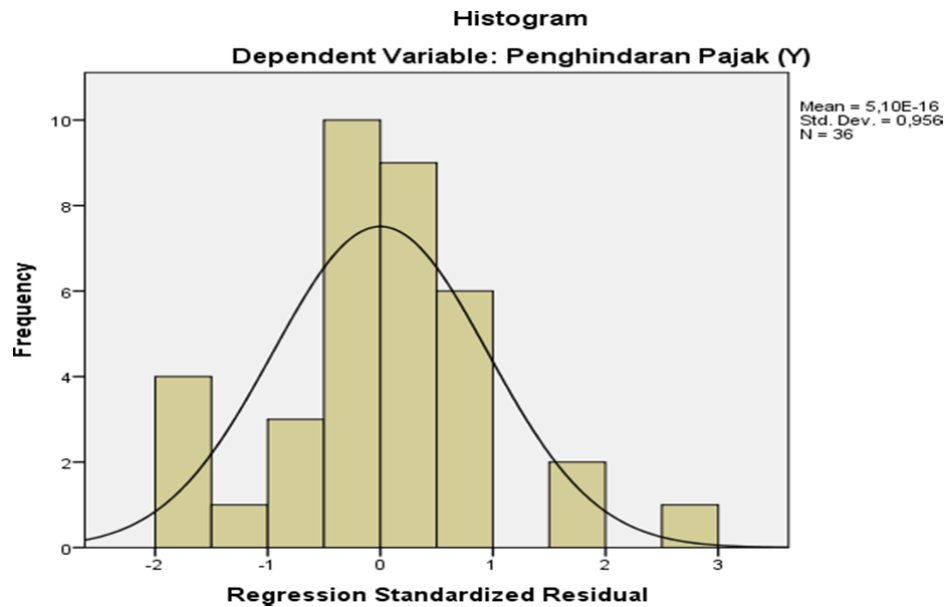
Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji grafik normal p-plot pada gambar 4.1 dan grafik histogram pada gambar 4.2. Berdasarkan grafik di bawah terlihat bahwa data menyebar di atas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1 Uji Grafik Normal P-Plot



Sumber: Data yang diolah SPSS versi 22

Gambar 4.2 Grafik Histogram



Sumber: Data yang diolah SPSS versi 22

Grafik normal p-plot pada gambar 4.1, titik-titik menyebar berhimpit di sekitar diagonal dan hal ini juga menunjukkan bahwa residual telah terdistribusi secara normal.



Grafik histogram pada gambar 4.2 menunjukkan bentuk yang simetris tidak condong ke kiri atau ke kanan, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa residual telah terdistribusi secara normal.

#### 4.2.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Hanafi, 2014). Untuk mengetahui ada/tidaknya multikolonieritas adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance.

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 dan 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Uji Multikolonieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.077	,312		-.247	,806		
Dewan Komisaris Independen (X1)	,680	,339	,343	2,008	,053	,901	1,109
Komite Audit (X2)	-.006	,062	-.020	-.102	,920	,696	1,436
Kepemilikan Institusional (X3)	,157	,122	,251	1,291	,206	,694	1,442

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)  
Sumber: Data yang diolah SPSS versi 22

**Tabel 4.5**  
**Uji Multikolonieritas Berdasarkan Nilai VIF dan Tolerance**

Variabel	Tolerance (Toleransi)	VIF
Komite Audit	,901	1,109
Dewan Komisaris Independen	,696	1,436
Kepemilikan institusional	,694	1,442

Sumber: Data yang diolah SPSS versi 22

Berdasarkan data di atas, uji multikolonieritas pada tabel 4.3. dan uji multikolonieritas berdasarkan nilai VIF dan tolerance pada tabel 4.4. Variabel yang tidak

menyebabkan multikolonieritas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang lebih kecil dari 10 dan nilai Toleransi lebih dari 0,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa Komite audit, Dewan komisaris Independen, dan Kepemilikan institusional tidak mengalami multikolonieritas karena nilai VIF < 10 dan toleransi > 0,1. Dapat disimpulkan, antar variabel independen tidak saling berpengaruh.

#### 4.2.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji durbin-watson (DW). Sebuah data dikatakan tidak memiliki masalah autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson (DW) berada diantara nilai dU (upper bound) dan 4-dU. Hasil pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4.6**  
**Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,400 <sup>a</sup>	,160	,081	,12929	1,725

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional (X3), Dewan Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2)

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Data yang diolah SPSS versi 22

Uji auto korelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin – Watson. Diketahui bahwa n=36 maka didapatkan nilai dL adalah 1,2953 dan dU adalah 1,6539. Berdasarkan hasil tersebut maka didapatkan bahwa:

a.  $dU = 1,6539$

b.  $dW = 1,725$

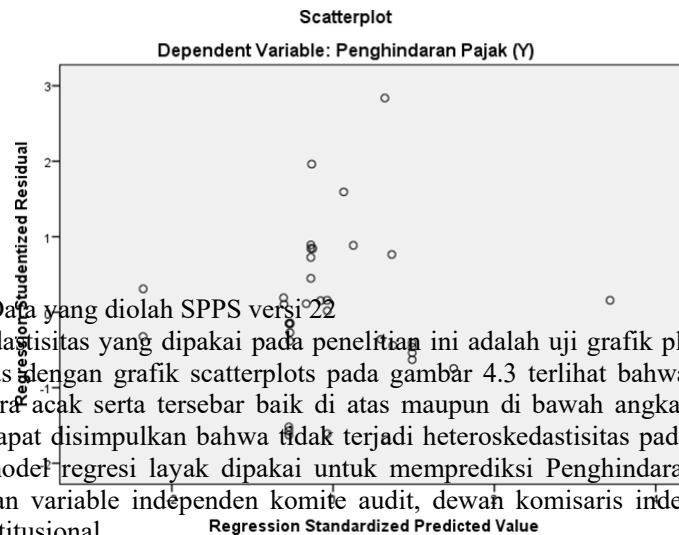
c.  $4 - dU = 2,7047$

Data dinyatakan tidak ada autokorelasi, positif atau negative adalah jika  $du < dW < 4 - du$ . Berdasarkan data di atas maka didapatkan  $1,6539 < 1,725 < 2,7047$  sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan varianc residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan studentized delete residual nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan studentized delete residual sehingga dapat dikatakan model tersebut homoskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Ghozali, 2013). Hasil pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.3.

**Gambar 4.3**  
Uji Heterokedastisitas dengan Grafik Scatterplot



Sumber: Data yang diolah SPPS versi 22

Uji heterokedastisitas yang dipakai pada penelitian ini adalah uji grafik plot. Dari uji heterokedastisitas dengan grafik scatterplots pada gambar 4.3 terlihat bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Penghindaran pajak berdasarkan masukan variable independen komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional.

#### 4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besari pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) (Ghozali, 2013). Penelitian ini menguji pengaruh corporate governance (komite audit, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional) terhadap penghindaran pajak perusahaan (cash effective tax rate). Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6.

**Tabel 4.7**  
Analisis Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,077	,312		-,247	,806
Dewan Komisaris Independen (X1)	,680	,339	,343	2,008	,053
Komite Audit (X2)	-,006	,062	-,020	-,102	,920
Kepemilikan Institusional (X3)	,157	,122	,251	1,291	,206

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)  
Sumber: Data yang diolah SPPS versi 22

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,077 + 0,680X_1 + (-0,006X_2) + 0,157X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -0,077, artinya jika tidak ada variabel komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional maka variabel independen sebesar 0,077.
2. Koefisien regresi dewan komisaris independen ( $X_1$ ) dalam Corporate Governance adalah 0,680, artinya setiap kenaikan dewan komisaris independen sebesar 1 poin, maka penghindaran pajak meningkat 0,680 point.
3. Koefisien regresi komite audit ( $X_2$ ) dalam Corporate Governance adalah -0,006, artinya setiap kenaikan komite audit sebesar 1 poin, maka penghindaran pajak menurun -0,006 point.
4. Koefisien regresi Kepemilikan Institusional ( $X_3$ ) dalam Corporate Governance adalah 0,157, artinya setiap kenaikan kepemilikan Institusional sebesar 1 poin, maka penghindaran pajak meningkat 0,157 point.

#### 4.2.4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi pada penelitian ini menggunakan acuan Adjusted R Square dimana Nilai Adjusted  $R^2$  berkisar  $0 < R^2 < 1$ . Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil uji koefisien Adjusted R Square dapat dilihat pada tabel 4.7.

**Tabel 4.8**  
**Uji Koefisien Determinasi  $R^2$**   
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,400 <sup>a</sup>	,160	,081	,12929

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional ( $X_3$ ), Dewan Komisaris Independen ( $X_1$ ), Komite Audit ( $X_2$ )

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Data yang diolah SPSS versi 22

Jika koefisien determinasi semakin mendekati 1, artinya model yang digunakan semakin tepat. Karena sumbangan variabel bebas dikatakan sempurna apabila nilainya = 1 yang ada besarnya adalah 100%. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa menunjukkan nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,081.

Hal ini berarti bahwa 0,081 (8,1%) variabel Penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh Corporate Governance (komite audit, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional). Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

#### 4.2.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis), yaitu dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji statistik t.

#### 4.2.5.1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-tabel dengan t-hitung. Jika t-tabel < t-hitung maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dan apabila nilai probabilitas signifikansi p-value < 0,05, maka suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ghozali, 2006).

**Tabel 4.9**  
**Uji Statistik t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,077	,312		-,247	,806
Dewan Komisaris Independen (X1)	,680	,339	,343	2,008	,053
Komite Audit (X2)	-,006	,062	-,020	-,102	,920
Kepemilikan Institusional (X3)	,157	,122	,251	1,291	,206

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Data yang diolah SPSS versi 22

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak  
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t-hitung (2,008) > t-tabel (1,694) dengan p-value (0,053) > (0,05). Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh Komite Audit dalam Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak  
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t-hitung (-0,102) < t-tabel (1,694) dengan p-value (0,920) > (0,05). Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak  
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t-hitung (1,291) < t-tabel (1,694) dengan p-value (0,206) > (0,05). Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

#### 4.3. Pembahasan

Pada sub-bab ini penulis akan melakukan pembahasan serta analisis hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Sebelum melakukan pembahasan hipotesis, penulis akan membahas data dari variabel dependen yang digunakan yaitu

penghindaran pajak yang dihitung dengan cash effective tax rate (CETR). Perusahaan menggunakan proksi pengukuran penghindaran pajak berupa Cash Effective Tax Rate (CETR<sub>it</sub>). CETR menggambarkan persentase total pajak penghasilan yang sesungguhnya dibayarkan perusahaan dari total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh, dilihat dari laporan arus kas perusahaan. Semakin mendekati nol nilai yang dihasilkan maka semakin agresif suatu perusahaan terhadap pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Data sampel pada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki nilai CETR yang mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan sampel terindikasi melakukan penghindaran pajak.

#### **4.4.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak**

Variabel dewan komisaris independen dalam corporate governance diukur dengan menggunakan proporsi jumlah komisaris independen dari total dewan komisaris pada satu perusahaan. Komisaris independen juga merupakan anggota dewan komisaris, tapi mereka mempunyai kekhususan dengan tidak boleh terkait atau berhubungan manajemen., anggota dewan komisaris yang lain serta pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan kaitannya yang mungkin bisa merusak keindependennya. Berdasarkan tabel 4.8, hasil analisis dengan menggunakan uji statistik t terhadap variabel dewan komisaris independen diperoleh nilai koefisien 0,680 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,008 dengan nilai sig 0,053 ( $>0.05$ ). Hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dalam corporate governance dapat meminimalisir penghindaran pajak.

Dalam penelitiannya, (Diantari & Ulupui, 2016). menyatakan semakin tinggi presentase komisaris independen maka semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki komisaris independen, karenanya independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak pihak yang tidak ada kaitan langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan penghindaran pajak dapat semakin rendah. Demikian sebaliknya, semakin rendah presentase komisaris independen maka independensi juga semakin rendah, sehingga kebijakan penghindaran pajak tinggi.

#### **4.4.2 Pengaruh Komite Audit dalam Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak**

Variabel ukuran komite audit dalam corporate governance dalam penelitian ini ditentukan dengan berapa banyaknya jumlah anggota komite audit dalam satu perusahaan manufaktur. Komite audit adalah komite yang memang dibuat pihak Dewan Komisaris untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan. Komite audit juga harus berfiat independen dan tentunya mempunyai tanggungjawab kepada dewan komisaris untuk mengkontrol dan mengawasi proses, aktivitas dan kinerja pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal serta membantu auditor menguatkan independensinya. Berdasarkan tabel 4.8, hasil analisis dengan menggunakan uji statistik t terhadap variabel komite audit diperoleh nilai koefisien (-0,006) dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar (-0,102) dengan nilai sig 0,920 ( $>0.05$ ). Hal ini berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit dalam corporate governance belum dapat meminimalisir penghindaran pajak.

Dalam penelitiannya, (Effendy, 2016). menyatakan komite audit di banyak perusahaan masih belum melakukan pengawasan dengan baik. Dinilai belum melakukan pengawasan dengan baik karna banyak komite audit yang tidak mempertanyakan secara kritis maupun menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian pelaksanaan tanggung jawab oleh manajemen. Hal ini bisa terjadi karna diduga penyebabnya bukan



karna kurangnya kompetensi melainkan banyak dari anggota komite audit tersebut yang belum mengerti akan tugas utamanya.

#### **4.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak**

Variabel kepemilikan institusional dalam corporate governance diukur dengan menggunakan jumlah saham institusional dari jumlah saham beredar pada satu perusahaan. Jumlah kepemilikan institusional akan mempengaruhi manajer untuk berfokus pada kinerja dan menghindari peluang untuk melakukan perilaku oportunistik yang mementingkan kepentingan pribadinya. Berdasarkan tabel 4.8, hasil analisis dengan menggunakan uji statistik t terhadap variabel kepemilikan institusional diperoleh nilai koefisien 0,157 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,291 dengan nilai sig 0,206 ( $>0.05$ ). Hal ini berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dalam corporate governance belum dapat meminimalisir penghindaran pajak.

Dalam penelitiannya, (Fadhilah, 2014) menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Alasan yang pertama dikarenakan kepemilikan institusional merupakan pemegang saham dari luar lingkungan perusahaan, sehingga mereka ikut serta dalam pengawasan perusahaan. Namun, hal ini bisa saja tidak terjadi karena pemilik saham institusional hanya mempercayakan pengawasan dilakukan oleh komisaris perusahaan yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Sehingga, ada atau tidak kepemilikan institusional tax avoidance tetap saja bisa terjadi. Alasan kedua ialah bahwa pemilik saham institusi memiliki keinginan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan atau laba yang akan mereka peroleh dari perusahaan. Hal tersebut membuat pemilik saham institusi akan mendukung apapun keputusan manajer yang akan menguntungkan perusahaan termasuk aktivitas penghindaran pajak. Sehingga besar kecil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan pengujian dengan 1 analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menguji pengaruh corporate governance dengan proksi proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada tahun 2014- 2017 dan dapat menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dalam corporate governance berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masuk ke dalam sampel penelitian ini.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa komite audit dalam corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masuk ke dalam sampel penelitian ini.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dalam corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masuk ke dalam sampel penelitian ini.

### **5.1 Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen, yaitu profitabilitas, kepemilikan manajerial, likuiditas, dan kinerja komite audit .
1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis dapat menambah periode tahun, sampel dan objek penelitian selain perusahaan manufaktur, agar hasil yang didapat lebih baik.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi penghindaran pajak selain cash effective tax rate (CETR) misalnya book tax rate (BTD), effective tax rate (ETR).
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan dewan komisaris dan dewan komisaris seperti sistem two-tier yang dianut di Indonesia.
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan kinerja dan latar belakang komite audit dengan membagikan kuesioner kepada salah satu perusahaan atau beberapa perusahaan.

## 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti hanya meneliti perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2017 dengan 9 perusahaan.
2. Peneliti hanya meneliti salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu corporate governance.
3. Mekanisme corporate governance pada penelitian ini hanya terbatas pada komite audit, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional.
4. Indonesia menganut sistem two-tier, yang membuat pemisahan dewan komisaris dan dewan direksi. Pada penelitian ini hanya menggunakan dewan komisaris.

## DAFTAR REFERENSI

- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). "Corporate governance, incentives, and tax avoidance". *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17.
- Chyz, J. A., & White, S. D. (2014). "The Association between Agency Conflict and Tax Avoidance": A Direct Approach. *Emerald Insight. In Advance In Taxation*.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana.
- Dechow, P.M. et.al. (1995). "Detecting Earning Management". *The Accounting Review*. 70(2), pp. 193-225.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2004). "Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives". *Ssrn*, (April). <https://doi.org/10.2139/ssrn.532702>.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia". *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana.
- Diantari, P. R. & Ulupui. IGK. A. (2016). "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 16, Halaman 702-732, ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, U. (2014). "Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan". *Journal of Accounting*, 3, 1–11.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2 (2014): 525539 ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana.
- Maulida, S. (2015). "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Luas Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013". *Artikel Universitas Esa Unggul*, 1–18.
- Midiastuty, P. P., & Suranta, E. (2017). "Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas". *Simposium Nasional Akuntansi XX*, Jember, 2017, 1–26.
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak". *Diponegoro Journal Of Accounting*, ISSN: 2337-3806, 4(3), 1–8.
- Nasution, M., & Setiawan, D. (2007). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi Makassar*, 1(12), 1–21.
- Ningsih, W. F., & Mildawati, T. (2017). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan". In *Simposium Nasional Akuntansi XX*, Jember, 2017 (pp. 1–27).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Otoritas jasa keuangan republik indonesia. NOMOR 33 /POJK.04/2014 Tentang*.
- Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2015). "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak". *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Lampung*.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak". *Skripsi Ilmiah Universitas Diponegoro*, 3(2), 1–13.
- Puspitaningrum, T., & Syafiqurrahman, M. (2015). "Pengaruh Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak". *S*, 1–23.
- Rosita, L., Respati, N. W., & Sondakh, A. G. (2017). "Pengaruh Kepemilikan Asing, Komisaris Independen, Efektivitas Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Lverage Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2010- 2015)" In *Simposium Nasional Akuntansi XX*, Jember, 2017 (pp. 1–18).
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan". *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 3, No. 4, Tahun 2014, Halaman 1-12. Universitas Diponegoro.
- Susanto, S., & Siregar, S. V. (2009). "Corporate Governance, Kualitas Laba, dan Biaya Ekuitas: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009" (pp. 1–28).
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015). "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak". *Jurnal Akuntansi*, XIX(3), 380–397.

- Wijayanti, A., Wijaya, A., & Chomsatu, Y. (2017). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan,GCG Dan CSR Terhadap Penghindaraan Pajak". *ECONOMICA Journal of Economic and Economic Education* Vol.5 No.2 (113-127) PENGARUH, 5(2).
- Winata, F. (2014). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013". *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.